

Pembagian Kerja Berdasarkan Gender dalam Pengelolaan Agroforestri di Hulu DAS Citarum

Salma Rizky Kinasih¹, Indri Wulandari²

¹Program Studi Antropologi, Universitas Padjadjaran
salmarizkyak@gmail.com

²Program Studi Doktorat Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran
indri.wulandari@unpad.ac.id

Abstract

This study discusses gender division of labor in agroforestry at Tarumajaya Village, upstream of Citarum Watershed. This study aims to describe the division of labor mechanism of agroforestry farmers based on the anthropology of gender perspective. The manifestation of gender can be seen from the mechanism of division labor on every kind of land-use system. Agroforestry is an intensive land-use system that combines crops, woods, and/or livestock in one intensive land to obtain economic-ecology harmonization. Agroforestry was introduced by the government through a top-down approach, by Peraturan Presiden No. 15/2018 about the Acceleration of Pollution Control and Damage to the Citarum River Basin, which is used to conserve the Citarum Watershed. Unfortunately, agroforestry had unfavorable condition due to the clash with crops habits and subsistence economic needs. The method used in this study was ethnographic methods and the data were collected by using literature study, observation, and in-depth interview. The data were analyzed using Gender Harvard Analytical Framework. This study found that the division of labor in agroforestry households is negotiable. Men and women have the opportunities to work together in the system. However, gender blind introduction of agroforestry only made women as cheap wage labor. They are being subordinated and alienated by the system. They don't have equal access and control to the technology, information, and market. These problems occur because gender intersects with various factors such as culture and religion, demography, economy, formal law, social class, and politics. Therefore, agroforestry needs to take a gender approach to get optimum results.

Keywords: Division of labor, gender, agroforestry, citarum harum

Abstrak

Studi ini membahas tentang pembagian kerja berdasarkan gender pada agroforestri di Desa Tarumajaya, Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Studi ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme pembagian kerja petani penggarap dan buruh tani agroforestri berdasarkan perspektif Antropologi Gender. Manifestasi gender terlihat dari mekanisme pembagian kerja pada setiap jenis sistem penggunaan lahan. Agroforestri merupakan salah satu sistem penggunaan lahan intensif yang menggabungkan tanaman

pertanian, kayu, dan/atau ternak dalam satu lahan intensif untuk mencapai harmonisasi ekonomi-ekologi. Agroforestri diperkenalkan oleh pemerintah secara *top-down*, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang digunakan untuk konservasi DAS Citarum. Sayangnya, kondisi agroforestri kurang mendukung karena berbenturan dengan kebiasaan tanaman pertanian dan kebutuhan ekonomi subsisten. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam. Data dianalisis dengan menggunakan kerangka *Gender Harvard Analytical Framework*. Studi ini menemukan pembagian kerja dalam rumah tangga agroforestri dapat dinegosiasikan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dalam sistem. Namun, pengenalan agroforestri yang buta gender menjadikan perempuan sebagai tenaga kerja berupah murah. Perempuan menjadi subordinat dan dialineasi oleh sistem. Selain itu, perempuan tidak memiliki akses dan kontrol yang sama ke teknologi, informasi, dan pasar. Permasalahan tersebut terjadi karena gender bersinggungan dengan berbagai faktor seperti, budaya dan agama, demografi, ekonomi, hukum formal, kelas sosial, dan politik. Oleh karena itu, agroforestri perlu mengambil pendekatan gender agar mendapatkan hasil yang optimal.

Kata kunci: Pembagian kerja, gender, agroforestri, citarum harum

Pendahuluan

Desa Tarumajaya merupakan penghasil komoditas perhasil pertanian sayur seperti kentang, wortel, daun bawang, dan kol yang terletak di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Kegiatan pertanian sayur yang tidak terkendali di Desa Tarumajaya, nyatanya tidak dapat dihindarkan dari okupasi hutan (Wawa, 2011). Akhirnya pertanian sayur melahirkan problematika lingkungan secara simultan, di antaranya; degradasi fungsi konservasi air, meningkatnya lahan kritis, erosi, serta pendangkalan di sungai, waduk, dan jaringan prasarana air (Imansyah, 2012).

Pemerintah lokal hingga pusat telah melakukan bongkar pasang program sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan di hulu DAS Citarum. Mulai dari Citarum Bergemar, Citarum Bestari, sampai yang terbaru melahirkan program Citarum Harum atas terbitnya Peraturan Presiden No. 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Program ini melibatkan berbagai pihak, antara lain; mitra kerja Perhutani, seperti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang

berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), ADB (*Asian Development Bank*) yang menjadi investor dalam program ICWRMIP (*Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*)¹. Meski berganti judul, secara garis besar program yang ada tetap mewajibkan petani penggarap hutan konservasi berpartisipasi mengatasi kerusakan 53.085 hektar lahan kritis. Salah satu caranya adalah mengubah pola pertanian sayur menjadi agroforestri (Abdoellah, Sunardi, Widianingsih, dan Cahyandito, 2019; Safitri, Saeful, Prawiranegara, dan Bachriadi, 2020).

Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang intensif, produktif dan memiliki kapasitas untuk menjaga keberlangsungan ekologi. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan produk pertanian (pakan ternak, kayu, buah-buahan, sayur-mayur) pada satu unit lahan dalam waktu yang sama atau bergiliran agar petani dapat melakukan subsistensi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (Jerneck dan Olsson, 2013; Kiptot dan Franzel, 2011).

¹Dokumen dan laporan tentang keberlangsungan proyek investasi dapat diakses dari laman resmi Asian Development Bank, <https://www.adb.org/projects/37049-023/main#project-pds>

Agroforestri dianggap sebagai solusi tepat untuk penanganan kerusakan DAS, karena tetap menyeimbangkan fungsi ekonomi dan ekologi hutan (Heryani dan Sutrisno, 2013; Ora dan Adrin, 2010; Rahman, Jacobsen, Healey, Roshetko, dan Sunderland, 2017). Pemerintah mengadaptasi agroforestri untuk mengatasi permasalahan hutan terkini di Indonesia (Butarbutar, 2009; Ross, 1984; Supriadi dan Pranowo, 2016; Syam, 2003). Menurut Bourne, Kimaiyo, Tanui, Catacutan, dan Otiende (2015), agroforestri dapat berkembang menjadi sistem yang lebih integratif dengan mensosialisasikan pemahaman atas peran gender dan pengelolaan pohon.

Penerapan agroforestri tidak dapat terlepas dari perubahan sosiopolitik (Ollinaho dan Kröger, 2021) yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi politik berbagai aktor yang terlibat di dalamnya. Penelitian Martin dkk. (2016) menyebutkan rendahnya keberhasilan agroforestri oleh petani tradisional disebabkan oleh perbenturan kebiasaan cara bertani terdahulu serta pengetahuan lokal petani. Permasalahan serupa terkait pendekatan terhadap petani juga terjadi pada pengelolaan agroforestri di DAS Citarum. Pada laman Humas Bappeda Jabar² disebutkan bahwa agroforestri yang dilakukan bertahun-tahun belum berhasil secara optimum, karena secara ekonomi tidak lebih menguntungkan daripada pertanian sayur (yang sebelumnya dilakukan), dan berbenturan dengan pengentasan kemiskinan. Berita di laman resmi ICWRMIP³ menyebutkan, kemungkinan gagalnya agroforestri disebabkan oleh petani yang merasa sangsi atas jaminan keberlangsungan pengelolaan tanaman setelah program agroforestri berakhir. Berdasarkan data tersebut, pendekatan berbasis sosial-budaya terhadap petani sebagai aktor dalam agroforestri perlu dilakukan. Salah satu pendekatan yang dapat dipilih adalah pendekatan gender.

²Pendapat ini berdasarkan hasil survei yang dikemukakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, M. Taufiq Budi Santoso, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Citarum Harum di Bandung, Rabu (5/02), Humas Bappeda Jabar (2020) diakses dari <http://bappeda.jabarprov.go.id/satgas-lakukan-evaluasi-citarum-harum/>

³Pendapat ini dikemukakan Direktur Utama BUMN Hijau Lestari I, H. Zulfi Ramlan Pohan, Kamis (2/2), PRLM (2012) diakses dari <http://citarum.org/info-citarum/arsip-berita/media-online/1037-keberhasilan-program-penghijauan-masih-rendah.html>

Gender merupakan konstruksi sosial berdasarkan nilai dan norma dalam kebudayaan yang berperan membedakan karakteristik pekerjaan feminin (sifat-sifat yang secara normatif didistribusikan pada perempuan) dan pekerjaan maskulin (sifat-sifat yang secara normatif didistribusikan pada laki-laki) (Kottak, 2017). Agroforestri bukan merupakan sistem yang netral gender, karena melibatkan laki-laki dan perempuan pada setiap aspek mekanisme kerja (Degrande dan Arinloye, 2014). Peran gender dalam agroforestri membedakan pengalaman, aktivitas, dan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Selain itu, gender juga menguraikan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan atas akses dan kontrol sumber daya, ekspresi dalam konflik, mekanisme kerja sama dan hidup berdampingan. Salah satu cara melihat aspek gender dalam agroforestri adalah melalui mekanisme pembagian kerja (Colfer dkk., 2015).

Berbagai penelitian tentang gender dan kaitannya pernah dilakukan, antara lain penelitian Villamor dkk. (2015) membedah mekanisme pembagian kerja agroforestri untuk mengetahui kesetaraan gender pada komunitas petani di Sumatera. Penelitian ini menemukan perubahan praktik pertanian dari monokultur menjadi agroforestri yang secara signifikan memengaruhi peran dan preferensi gender. Apabila dibandingkan dengan pertanian monokultur, agroforestri lebih meningkatkan produktivitas petani perempuan yang dikhususkan bekerja pada pengelolaan hasil pertanian non kayu (kayu bakar, tanaman obat, buah-buahan) untuk subsistensi, administratif keuangan, dan kegiatan pengelolaan pertanian non fisik. Implikasinya, perempuan dapat lebih berdaya dan memiliki akses dalam pewarisan tanah.

Penelitian lainnya yaitu penelitian Pasaribu dkk. (2019) yang membahas tentang pengelolaan

sistem agroforestri di desa Sungai Langka, Tahura Wan Abdul Rahmat yang dikelola Pemerintah Provinsi Lampung. Agroforestri dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan hutan untuk fungsi sosial tanpa merusak ekosistem hutan. Berdasarkan hasil penelitian, laki-laki cenderung aktif dalam kegiatan persiapan lahan (76,74%) dan penanaman (93,02%), sedangkan perempuan cenderung melakukan kegiatan pasca panen (93,02%) dan pemasaran (93,02%). Pembagian tugas dilakukan berdasar persepsi perempuan yang lebih teliti, cermat, dan lembut daripada laki-laki yang kuat.

Penelitian, Wiyanti (2014) membahas tentang pembagian kerja berdasarkan gender dalam konteks agroforestri masa kini yang begitu fleksibel dan dapat dinegosiasikan. Keterbatasan tenaga kerja menyebabkan tidak ada lagi pembatas tegas antara pekerjaan feminin dan maskulin. Akibatnya, perempuan dan laki-laki kini dapat sama-sama berpartisipasi mengelola hutan dan mewujudkan kehidupan sosial yang rendah karbon untuk menjaga bumi.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini akan menggunakan sudut pandang antropologi gender agar dapat melihat distribusi pembagian kerja berdasarkan gender dalam pengelolaan agroforestri di Desa Tarumajaya, Citarum Hulu. Berbeda dengan penelitian terdahulu, Studi ini fokus menguraikan pembagian kerja menggunakan metode analisa gender model Harvard yang kemudian digali secara etnografi. Kondisi latar geografis, sosial, dan waktu yang berbeda dapat memengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, referensi yang telah diuraikan sebelumnya membantu peneliti dalam menyusun penelitian.

Kajian Pustaka

Gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan peran antara

laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender berbeda dengan definisi *sex* (jenis kelamin) yang bersifat kodrati dan membedakan manusia secara biologis menjadi laki-laki dan perempuan. Gender merupakan konsep budaya yang berperan mendistribusikan sifat feminin yang normatif dimiliki perempuan (seperti anggun, merawat anak, dan akrab dengan sektor domestik) dan sifat maskulin yang normatif dimiliki laki-laki (seperti kuat, bekerja, dan akrab dengan sektor publik). Distribusi sifat pada gender dapat dipertukarkan, artinya laki-laki dapat memiliki sifat feminin, begitu pula sebaliknya (Kottak, 2017).

Kiptot dan Franzel (2012) menyebut gender sebagai variabel penting untuk mengamati proses perubahan lingkungan. Persinggungan gender dengan berbagai faktor sosial, meliputi usia, status sosial-ekonomi, dan etnis membedakan keterampilan, peluang dan hambatan bagi laki-laki maupun perempuan untuk ambil peran dalam ranah pengelolaan hutan dan agroforestri. Persepsi aktivitas dan tanggung jawab kerja antara laki-laki dan perempuan pun dibedakan oleh gender. Akibatnya, laki-laki dan perempuan memiliki peran, tanggung jawab dan pengetahuan yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam. Lebih dalam lagi, gender dapat menguraikan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan terhadap akses dan kontrol sumber daya berdasarkan dinamika konflik, kerja sama dan cara hidup dalam mengelola lingkungan (pertanian) dan rumah tangga.

Relasi gender dapat terlihat dari skema pertanian berbasis keluarga⁴ yang ditandai dengan sistem produksi pertanian dilakukan dengan tujuan subsistensi keluarga serta ekonomi lokal. Pada pertanian berbasis keluarga, perempuan dan (sama halnya dengan) laki-laki merupakan tenaga kerja. Namun, perempuan justru riskan tereksplotasi dalam permasalahan akses dan kontrol terhadap alat produksi (Sachs, 2019).

⁴Pertanian berbasis keluarga (*family, or peasant farmers*) merujuk pada penjelasan (Sachs, 2019, hal. 124–128) tentang *family farmers* sebagai SCP (*Simple Commodity Producers*) yaitu transisi dari PCP (*Petty Commodity Producers*) ke sistem kapitalis. Pada uraiannya Sachs menyebutkan ciri *family farmers*, yaitu; (i) keluarga memiliki dan mengelola alat produksi pertanian, (ii) proses kerja keluarga berlangsung tanpa –atau sangat terbatas– dalam upah, dan (iii) keluarga menjadi kontrol atas alat reproduksi tenaga kerja.

Perempuan tidak dapat mengelak dalam relasi pertanian berbasis keluarga yang bernuansa patriarki (Sachs (2019). Perempuan sebagai tenaga kerja sering kali didiskreditkan dalam akses kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Pada umumnya mereka mengalami *house-wifization* atau domestikasi pekerjaan dalam bidang pertanian.

Domestikasi terhadap perempuan terlihat pada pola umum pembagian kerja pertanian berdasarkan gender yang cenderung menempatkan mereka pada kegiatan yang lebih dekat ke dapur, sementara laki-laki difokuskan pada pencarian nafkah (Sachs, 2019). Perempuan rata-rata diposisikan pada pekerjaan yang reproduktif (pencangkakan, penyiangan, dan pemanenan), sedangkan laki-laki pada kegiatan produktif (penggunaan traktor, gergaji, mesin, lembu, dan kerbau). Domestikasi perempuan pun terjadi dalam pemilihan komoditas tanaman (Colfer dkk, 2015). Perempuan pada umumnya mengelola tanaman sayur yang merupakan pemenuhan kebutuhan subsisten, sementara laki-laki mengelola tanaman biji-bijian dan tanaman ekspor. Pembagian kerja akan bervariasi di setiap daerah tergantung faktor lainnya, seperti agama, budaya, demografi, kelas, etnis, hukum, lokasi tanaman, dan norma.

Gender juga turut memengaruhi sistem produksi pertanian berbasis keluarga berbentuk agroforestri (Degrande dan Arinloye, 2014). Berdasarkan analisis Siscawati (2020) kajian gender dalam agroforestri hadir pada ranah mikro (teknis), meso (implementasi dan akses), serta makro (kebijakan global). Penelitian pada ranah mikro menghubungkan hal teknis terkait pembagian kerja dengan strategi subsistensi, mekanisme ekonomi keluarga, isu demografis, domestikasi peran, dan dinamika di luar rumah tangga. Hal ini menekankan pentingnya penelitian dalam melihat hubungan gender dan agroforestri secara komprehensif.

Gender dalam agroforestri sebagai kontrol perilaku yang membedakan cara laki-laki dan perempuan memersepsikan agroforestri (Nguyen dkk. 2021). Gender beserta faktor sosial lainnya seperti kelas, usia, dan etnisitas

bertugas mendiferensiasikan pengetahuan petani laki-laki dan perempuan menjadi spesifik pada aktivitas tertentu (Ayantunde dkk., 2008). Pada sistem agroforestri yang komprehensif, gender menyebabkan timbulnya spesialisasi kerja antara laki-laki dan perempuan pada aktivitas atau pengelolaan komoditas pertanian tertentu. Misal, pada pengelolaan agroforestri di Sulawesi Tenggara dan Selatan, perempuan cenderung fokus pada pengelolaan sayur, pohon, dan hasil sekunder untuk kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, laki-laki berfokus pada pengelolaan komoditas pertanian yang memiliki nilai jual saja (Mulyoutami dkk., 2015). Lebih lanjut spesialisasi pengetahuan menjadi tajam karena terlembaga kuat dalam peraturan dan program pemerintah (Elias dkk., 2020).

Perempuan dalam agroforestri umumnya bertanggung jawab mengelola pohon, terutama pada tahap awal pengelolaan (reproduktif) dan mengerjakan berbagai kegiatan yang condong berorientasi untuk subsistensi dapur (Degrande dan Arinloye, 2014). Perempuan cenderung memprioritaskan kebutuhan subsisten untuk rumah tangga. Mereka tergerak mengelola hasil sekunder yang tidak signifikan bernilai ekonomi seperti hasil hutan non-kayu, sehingga mereka memiliki pengetahuan khusus tentang pengelolaan non-kayu. Selain itu, peran perempuan pun dibatasi oleh beberapa hal, di antaranya jam kerja fleksibel, tidak banyak melibatkan pekerjaan fisik berat, dan tidak riskan konflik dan sengketa. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat membagi tugas dengan memasak dan mengurus anak dan berbagai kegiatan produktif lain seperti bertani sayur, peternakan kecil-kecilan, pengelolaan pangan, dan lain-lain.

Sementara itu, laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki peran dominan dalam seluruh aspek kegiatan agroforestri. Mereka bertanggung jawab atas segala hal yang bernilai jual ekonomi. Laki-laki mengontrol, mengelola dan mengambil keputusan terhadap lahan dan tenaga kerja. Bahkan, mereka pun dapat mempekerjakan istrinya pada situasi dan kondisi tertentu. Peran laki-laki dalam agroforestri juga dipertebal

oleh peraturan pemerintah yang mengatur alur masuknya informasi, bantuan dan penyuluhan terbatas untuk laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga.

Penelitian Wiyanti (2014) di Cianjur membenarkan bahwa seiring berjalannya waktu, peran perempuan dalam kegiatan reproduktif rumah tangga turut termanifestasikan ke pertanian. Namun, kini perempuan dalam agroforestri dapat bekerja lebih fleksibel. Perempuan turut mengerjakan pekerjaan fisik yang semula dipersepsikan untuk laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dapat dinegosiasikan dan berubah berdasarkan situasi dan kondisi tertentu.

Kompleksitas pembagian kerja berdasarkan gender dalam agroforestri membedakan pengetahuan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut terjadi karena agroforestri berupaya memadukan kedua jenis pengetahuan (baik laki-laki maupun perempuan) menjadi pertanian intensif agar mampu mendapatkan keuntungan dan menjaga keberlangsungan alam (Colfer dkk., 2015). Oleh karena itu, studi untuk menguraikan beragam mekanisme pembagian kerja dalam pengelolaan agroforestri di berbagai latar kebudayaan menarik – termasuk budaya petani di hulu DAS Citarum – menarik untuk dilakukan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode etnografi untuk dapat memahami secara holistik perilaku dan pengetahuan petani agroforestri yang menyebabkan terjadinya pembagian kerja berdasarkan gender. Penelitian ini berbasis pada tiga teknik pengumpulan data yaitu; 1) studi literatur terhadap artikel, buku, data statistik kependudukan dan prosiding sebagai dasar untuk menguraikan konsep, teori dan analisis yang relevan, 2) observasi partisipasi, dan 3) wawancara semi terstruktur terhadap 13 informan pada tanggal 19 – 20 Maret 2020 dan 15 Februari – 5 Maret 2021.

Lokasi penelitian berada pada areal hutan Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Berdasarkan SK Menteri

Kehutanan 195/Kpts-II/2003 dan data pengelolaan HGU dari JKPP yang diolah Safitri dkk. (2020), luas hutan di Tarumajaya ditaksir mencapai 3,844.51 hektar. Pemanfaatan hutan tersebut terbagi untuk 29,31% hutan lindung, 18,92% hutan konservasi, serta 51,77% Areal Pemanfaatan Lainnya (APL).

Berdasarkan pendataan KULIN KK LMDH, Hutan APL menjadi tumpuan bagi 934 petani penggarap. Pada umumnya, setiap petani penggarap memperkerjakan 2 – 4 orang buruh tani yang tidak mengelola lahan garapan pribadi. Beberapa buruh tani juga petani penggarap bekerja dalam skema resiprositas atau upahan. Lahan garapan tersebar dalam patok kecil dengan luas 3 – 5 patok (1.050 – 1.750 m²). Luas tersebut cenderung menyempit, karena hak garapnya diwariskan. Petani dapat mengalihkan hak garap dengan skema bagi-hasil atau sewa.

Penelitian ini berfokus pada aktivitas petani penggarap di petak-petak sekitar situs Bongkor. Lokasi tersebut dinilai strategis, karena terletak di Dusun Pejaten, sekitar 2 kilometer dari Kantor Desa Tarumaja dan berbatasan langsung dengan APL. Bongkor juga merupakan Pusat Pembibitan Citarum Harum yang terdiri dari berbagai instansi seperti Satgas Citarum Harum, Artha Graha Peduli (AGP), dan Budiasih. Bongkor bertanggung jawab dalam pengadaan bibit tanaman keras, sosialisasi, dan monitoring pengelolaan agroforestri.

Kerangka analisis gender model Harvard digunakan untuk memahami struktur berdasarkan potensi, kebutuhan, dan kepentingan bagi laki-laki dan perempuan dalam agroforestri. Kerangka analisis gender model Harvard dinilai memiliki keunggulan dalam menguraikan bentuk pekerjaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Rahmawati dan Abdulkadir-Sunito, 2015). Komponen kerangka analisis Harvard adalah: 1) pembagian kerja meliputi siapa yang melakukan kegiatan produktif, reproduktif dan sosial, kapan dan di mana dilakukan pekerjaan serta frekuensi; 2) profil akses (peluang) terhadap sumber daya fisik/materiil, pasar, dan sumber daya sosial – budaya seperti informasi, pendidikan,

pelatihan tenaga kerja; dan 3) faktor-faktor lainnya yang memengaruhi kedudukan laki-laki dan perempuan dan sosial seperti faktor ekonomi-politik (kebijakan struktural), faktor kependudukan (urbanisasi dan migrasi), faktor sosial-budaya, religi, teknologi dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Menemukenali Agroforestri

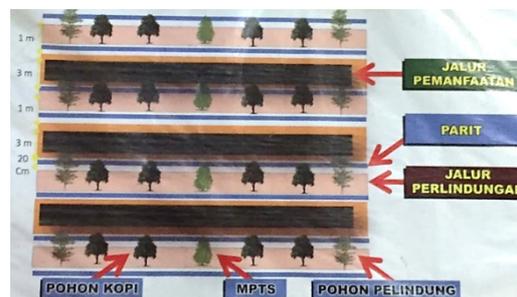
Pemerintah melakukan introduksi agroforestri di Desa Tarumajaya sejak tahun 1982, kala dibukanya izin penggunaan hutan dengan model tumpang sari palawija-sayur. Namun, tumpang sari tidak dilakukan dengan serius akibat kurangnya sosialisasi, kontrol, serta maraknya Kredit Usaha Tani (KUT).

Agroforestri di Desa Tarumajaya kemudian kembali diterapkan dalam program Citarum Bergetar dengan tujuan reforestasi. Berdasarkan wawancara dengan Ujang seorang tokoh organisasi petani menyebutkan bahwa, program Citarum Bergetar menutup hutan untuk pertanian sayur dan mendesak petani mundur dari petak garapannya yang terletak di lereng gunung untuk mengembalikan ekosistem hutan. Selanjutnya, para petani dan lembaga swadaya masyarakat pegiat Citarum dikumpulkan dalam suatu forum yang disebut "Forum Petak 73". Forum ini merumuskan kompensasi yang akhirnya menghasilkan opsi 3A (Alih Komoditas – ke kopi, jarak, alpukat; Alih Profesi – ke peternak, dan Alih Lokasi – ke Cianjur Koleberes). Akibatnya, pada awal tahun 2000, hutan mulai ditumbuhi tanaman keras, kayu, dan rumput-rumputan.

Pada tahun yang sama, ditetapkan Surat Keputusan (SK) Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat yang mengatur relasi penguasaan lahan antara Perhutani dan petani (Wahanisa, 2015). Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh petani penggarap hutan di hulu DAS Citarum berkedudukan sebagai mitra kerja yang terorganisir dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan setiap desa. Sebagai mitra, petani wajib

berpartisipasi aktif dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan yang disebut Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Secara singkat, PHBM mewajibkan petani penggarap hutan untuk menjaga ekosistem hutan sesuai fungsi konservatifnya dengan melakukan agroforestri yaitu tumpang sari tanaman keras kopi dan alpukat.

Agroforestri dilaksanakan dengan intensitas tinggi dan pantauan militer Kodam III/Siliwangi atau biasa disebut Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum. Pertanian sayur dan pembukaan lahan hanya dapat dilakukan pada lahan dengan tingkat kemiringan 15-25%. Petani juga diharuskan melakukan tumpang sari sayur dengan tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree System*) yaitu tanaman kayu yang dapat dimanfaatkan bagian lainnya seperti buah dan daun (kopi, alpukat, pisang), rumput, dan tanaman kayu (kayu putih, pinus, suren). Salah satu ciri dari agroforestri dari Citarum Harum adalah menekankan pada penanaman kopi.



Gambar 1. Prototipe penanaman agroforestri
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 2. Kebun agroforestri yang dikelola petani
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan sosialisasi Citarum Harum, agroforestri dirancang dengan model lorong berukuran 1 x 3 m. Setiap 3 m areal pemanfaatan harus menyiapkan 1m untuk jalur perlindungan dan 20 cm parit. Areal pemanfaatan dapat digunakan untuk menanam tanaman

sayur. Jalur perlindungan dikhususkan untuk pohon kopi, MPTS, dan pohon pelindung. Petani melakukan efisiensi lahan dengan menerapkan model tanam seling tanaman kopi di antara tanaman sayur setiap jarak 3 meter. Mereka juga menanam MPTS dan pohon pelindung sebagai tanaman pagar.

Sosialisasi agroforestri dilakukan secara *top-down* dan melibatkan berbagai pihak eksternal. Selain pemerintah melalui Satgas Citarum Harum, terdapat dukungan pihak swasta melalui AGP dan Budiasih. Berbagai institusi pendidikan dan LSM juga turut berpartisipasi dengan melakukan penelitian serta pengabdian kepada petani. Agroforestri telah berkembang dari tumpang sari menjadi *silvipastoralism* (terintegrasi dengan ternak ikan atau kelinci) pada beberapa demplot yang tidak jauh dari Bongkor.

Sementara itu, introduksi agroforestri sebagai sistem pertanian baru ternyata tidak terlepas dari konflik dan permasalahan sosiopolitik. Berdasarkan wawancara dengan Tatang dari organisasi tani lokal, muncul kekecewaan terhadap agroforestri karena tidak menempatkan petani sebagai ujung tombak pergerakan. Hal ini berdampak pada keberagaman pemahaman petani terhadap agroforestri.

Pemerintah dan lembaga donor menganggap agroforestri sebagai sistem pertanian yang komprehensif menyeimbangkan fungsi ekonomi, ekologis, dan sosial (Jerneck dan Olsson, 2013; Mayrowani dan Ashari, 2016; Noordwijk dkk., 2005; Ollinaho dan Kröger, 2021). Namun, petani justru memahami agroforestri sebagai sistem rumit yang merugikan. Mayoritas petani sayur menganggap penerapan agroforestri sebagai tumpang sari, atau pertanian multikomoditas. Hal ini berlawanan dengan kebiasaan mereka yang fokus mengelola tanaman satu musim. Kebiasaan ini memiliki alur distribusi keuntungan yang relatif lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan subsisten, dan terjamin dengan adanya *patron-client*. Petani sayur yang menggarap hutan tidak memiliki jaminan dan kekuatan hukum untuk terus menggarap hutan apabila kelak agroforestri menghasilkan ekosistem hutan kayu. Imbasnya,

petani tidak jarang melakukan resistensi secara terbuka (demonstrasi) maupun tertutup (pengabaian perawatan, pengkerdilan, penebangan yang dilakukan terhadap tanaman MPTS dan kayu-kayuan).

Pengelolaan Agroforestri

Pengelolaan agroforestri yang dimaksud Perhutani dalam PHBM terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pengelolaan tanaman sayur dan pengelolaan tanaman keras (Mayrowani dan Ashari, 2016). Pengelolaan tanaman sayur dilakukan dengan merotasi tanaman tiap 2 – 3 kali per tahun. Banyak rotasi dilakukan berdasarkan kemampuan mengairi kebun, ketersediaan bibit, dan pengetahuan lokal terhadap musim tanam. Umbi-umbian seperti kentang, ubi, dan wortel ditanam pada musim kemarau. Lalu, pada musim hujan menanam tanaman sayur daun seperti kol dan sawi. Sementara itu, tanaman polong dan sayuran buah seperti kacang tanah, daun bawang, tomat, cabai, dan bawang ditanam pada musim pancaroba.

Pengelolaan tanaman keras mencakup tanaman MPTS dan tanaman kayu. Pengelolaan tanaman keras tidak memerlukan banyak tenaga dan biaya, tetapi memiliki periode tanam yang lebih panjang. Tanaman MPTS memerlukan satu tahun sampai bisa berbuah, sedangkan tanaman kayu tidak boleh ditebang atau panen demi kepentingan konservasi. Selain tanaman sayur dan tanaman keras, terdapat pula kebun rumput-rumput. Kebun diisi tanaman rumput liar, rumput gajah, atau serai wangi. Rumput yang ditanam digunakan untuk kebutuhan pakan ternak.

Berdasarkan hasil penelitian Pasaribu dkk., (2019) dan Wiyanti (2014), umumnya agroforestri terdiri dari empat fase. *Pertama*, fase pembukaan lahan meliputi mengumpulkan rumput, membakar rumput dan menggemburkan tanah. *Kedua*, fase persiapan berkebun meliputi mencangkul, membuat lubang, dan menabur bibit. *Ketiga*, fase berkebun meliputi menanam, mencangkul, membuat saluran air, memberi pupuk, menyuburkan, dan menyiangi. *Keempat*, masa panen tanaman. *Kelima*, fase pasca-panen meliputi transportasi hasil panen, menjual hasil panen, dan memasak.

Aktivitas		Rumah Tangga Petani Penggarap		Rumah Tangga Buruh Tani	
Bahasa Sunda	Bahasa Indonesia	Suami	Istri	Suami	Istri
Tahap Pembukaan Lahan					
<i>Ngarambah</i>	Membuka hutan	✓	✗	✗	✗
Tahap Persiapan Penanaman					
<i>Meresihan</i>	Membersihkan lahan	✓	✗	✓	✓
<i>Macul</i>	Mencangkul	✓	✗	✓	✓
<i>Ngagurat</i>	Menggariskan tanah	✓	✗	✓	✓
Tahap Bercocok Tanam					
<i>Nyongkog</i>	Membuat lubang	✓	✗	✓	✓
<i>Nabur bibit</i>	Menyemai bibit	✓	✓	✓	✓
<i>Ngaruang</i>	Mengubur bibit:				
	Sayur	✓	✓	✓	✓
	Kopi, <i>Kai</i>	✓	✗	✓	✗
<i>Nandon</i>	Pemberian pupuk kandang	✓	✓	✓	✓
<i>Ngemes, ngedobel</i>	Pemberian pupuk kimia	✓	✓	✓	✓
	Pemberian herbisida	✓	✗	✓	✗
<i>Ngaramas</i>	Menyiangi rumput	✗	✓	✓	✓
<i>Nga-hidengkeun</i>	Menumpuk dedaunan	✓	✓	✓	✓
<i>Ngarurukan, ngarekre</i>	Memangkas ranting:				
	Kopi	✓	✓	✓	✓
	Alpukat	✓	✗	✓	✗
	<i>Kai</i>	✓	✗	✓	✗
<i>Ngobat</i>	Penyemprotan pestisida	✓	✗	✓	✗
<i>Nyebor</i>	Penyiraman	✓	✗	✓	✗
Tahap Panen					
<i>Manen</i>	Panen:				
	Sayur	✓	✓	✓	✓
	Kopi	✓	✓	✓	✓
	Alpukat	✓	✗	✓	✗
<i>Ngangkut panen</i>	Transportasi panen:				
	Panen	✓	✗	✓	✗
	Sisa panen	✓	✓	✓	✓
Tahap Pasca-panen					
<i>Masarkeun</i>	Penjualan	✓	✗	✗	✗

Pembibitan	Pembibitan	✓	✗	✓	✓
<i>Masak</i>	Memasak	✗	✓	✗	✓

Tabel 1. Pembagian Kerja dalam Agroforestri
Sumber: Data Lapangan

Keterangan:

■ : Dominan

✓ : Diprioritaskan melakukan

✗ : Diprioritaskan tidak melakukan

Tabel 1 menunjukkan distribusi pembagian kerja berdasarkan gender dalam agroforestri telah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat perbedaan karakteristik distribusi pekerjaan dalam keluarga petani penggarap dan buruh tani. Hal ini sejalan dengan analisis Sachs (2019) yang menyatakan bahwa sistem pertanian yang menggunakan keluarga sebagai unit produksi menempatkan perempuan lebih banyak pada kegiatan re-produktif, sedangkan laki-laki pada kegiatan produktif. Namun, nyatanya kondisi dapat berbanding terbalik pada keluarga buruh tani. Seperti diungkapkan pada studi terbaru Rahmawati dan Abdulkadir-Sunito (2015) pada keluarga buruh tani, mengatakan perempuan memiliki curahan jam kerja lebih tinggi pada kegiatan produktif dan reproduktif dibandingkan perempuan dari keluarga petani penggarap.

Akses dan Kontrol Pengelolaan Agroforestri

Akses dan kontrol menentukan derajat manfaat dan produktivitas pengelolaan agroforestri. Akses dan kontrol dapat dibedakan secara horizontal (suami – istri) dan vertikal (petani penggarap – buruh tani). Menurut Degrande dan Arinloye (2014) perbedaan derajat akses dan kontrol yang terlalu kontradiktif dapat menyebabkan ketimpangan.

Kerangka analisis Harvard memetakan akses dan kontrol dalam dua kategori yaitu sumber daya dan manfaat (Puspitarini dan Familia, 2018). Sumber daya meliputi alat-alat yang berhubungan dengan kegiatan produksi agroforestri (tanah, air, bibit, teknologi) serta kegiatan reproduksi (tenaga kerja dan kegiatan penyuluhan); sedangkan manfaat meliputi pengelolaan pendapatan (untuk pertanian dan subsistensi rumah tangga), pasar, pendidikan,

dan kesempatan melakukan politik praktis.

	Rumah Tangga Petani Penggarap				Rumah Tangga Buruh Tani			
	Akses		Kontrol		Akses		Kontrol	
	Sua- mi	Is- tri	Sua- mi	Is- tri	Sua- mi	Is- tri	Sua- mi	Istri
Sumber Daya								
Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Air	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Bibit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Teknolo- gi	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Tenaga kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Penyu- luhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Manfaat								
Keun- tungan:								
Kebun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Subsis- ten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pasar	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pendi- dikan	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Politik praktis	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Tabel 2. Akses dan Kontrol dalam Agroforestri
Sumber: Data Lapangan

Keterangan:

■ : Dominan

✓ : Mendapatkan akses/kontrol

✗ : Tidak mendapatkan akses/kontrol

Tabel 2 menunjukkan terbukanya peluang akses bagi setiap suami dan istri dalam keluarga petani penggarap dan buruh tani. Bagian akses yang sulit dijangkau adalah pasar, karena kegiatan pengelolaan agroforestri spesifik pada olah lahan. Setelah olah lahan selesai, maka pekerjaan akan diberikan kepada bandar. Selanjutnya, ditemukan ketimpangan kontrol pada seluruh aspek sumber daya dan manfaat yang terjadi antara keluarga petani penggarap dan buruh tani. Hal ini juga dikemukakan oleh Puspitarini dan Familia (2018) dan Rahmawati dan Abdulkadir-Sunito (2015) bahwa buruh tani perempuan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap pengelolaan air, teknologi, dan politik praktis.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan setiap rumah tangga petani, diketahui bahwa

permasalahan akses menyebabkan ketimpangan secara struktural yang menyubordinasikan perempuan dalam pembagian kerja. Selain itu, partisipasi perempuan hanya sebatas menjadi tenaga kerja upah murah. Secara tidak langsung permasalahan tersebut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan agroforestri.

Membedakan Distribusi Pembagian Kerja Keluarga Petani Penggarap dan Buruh Tani

Keluarga petani penggarap memiliki unit produksi suami dan istri yang bertindak sebagai tenaga kerja (Sachs, 2019). Keluarga petani penggarap dan buruh tani dibedakan berdasarkan akses terhadap penguasaan lahan. Keluarga buruh tani tidak menguasai lahan, sehingga bekerja upahan pada petani penggarap.

Buruh tani terbagi menjadi dua kategori yaitu (1) buruh tani tetap atau buruh tani yang bekerja tetap kepada *patron* (tuan tanah; petani penggarap) dengan upah kisaran laki-laki Rp 30.000 – Rp 40.000/hari dan perempuan Rp 28.000/hari – Rp 35.000/hari ditambah tunjangan hari raya dan bonus saat panen; dan (2) buruh tani serabutan atau buruh tani yang bekerja kondisional, misalnya untuk membantu membersihkan lahan atau *ngaramas* dari kebun ke kebun dengan upah kisaran laki-laki Rp 50.000/hari ditambah rokok dan perempuan Rp 30.000/hari yang disesuaikan kembali dengan jarak kebun. Perbedaan upah antara buruh tani tetap dan buruh tani serabutan ditentukan berdasarkan perbedaan jaminan sosial dari *patron*.

Pada tahap persiapan bercocok tanam dalam keluarga petani penggarap, perempuan –yang juga istri– tidak memiliki kewajiban untuk mempersiapkan lahan. Kegiatan persiapan pembukaan lahan dilakukan oleh laki-laki –yang juga suami– dan beberapa buruh tani yang masih terikat hubungan saudara atau pertemanan. Selain itu, terdapat pula kewajiban tidak tertulis bagi perempuan untuk membawakan dan mempersiapkan bekal makan siang di kebun.

Pada tahap persiapan bercocok tanam keluarga buruh tani, perempuan tidak banyak memiliki

pilihan dalam pekerjaan. Tingginya persaingan kerja membuat buruh tani perempuan dituntut untuk bisa melakukan hal-hal yang semula dianggap maskulin. Oleh karena itu, perempuan melakukan kegiatan serupa buruh tani laki-laki seperti bekerja sama membersihkan lahan, mencangkul, dan memotong rumput dengan arit.

Di samping itu, dikotomi pembagian kerja pada tahap bercocok tanam keluarga petani penggarap lebih tajam daripada keluarga buruh tani. Kegiatan pengelolaan tanaman (penyiangan, pembersihan) ditanggung jawabkan kepada perempuan. Laki-laki bertugas pada pekerjaan yang akrab dengan pengoperasian teknologi, pekerjaan yang memakan waktu di luar jam kerja, dan pekerjaan yang membutuhkan ketahanan fisik, seperti penggunaan mesin semprot pestisida, pengoperasian selang dan kincir air untuk menyiram, serta memanjat.

Distribusi pembagian kerja serupa juga dilakukan oleh keluarga buruh tani. Meski demikian, buruh tani bekerja lebih fleksibel sesuai arahan *patron*. Misalnya, demplot yang memiliki lebih banyak buruh tani perempuan, maka perempuan harus bersiap mengoperasikan mesin semprot untuk dapat mengaplikasikan pestisida. Namun, apabila buruh tani laki-laki lebih banyak, maka laki-laki yang harus bersiap *ngaramas*.

Begitu memasuki masa panen sayur, petani penggarap umumnya memberikan pekerjaan mereka pada tengkulak. Setelah bertransaksi, tengkulak beserta buruh *jabrug* (buruh panen yang umumnya laki-laki) bertugas menimbang, mentransportasikan hasil panen menuju tempat pencucian (khusus wortel), dan mendistribusikan hasil panen ke pasar. Sementara itu, sisa-sisa hasil panen yang tidak terangkut (karena kualitas, atau karena tidak teliti pengambilannya) diambil oleh *ngasag* (profesi pengambil hasil sisa panen, bisa laki-laki atau perempuan) dan buruh tani untuk memenuhi stok rumah tangga, dijual ke bandar kecil, dan pakan ternak.

Pada masa panen tanaman MPTS (kopi, alpukat), tengkulak tidak langsung mengambil alih pekerjaan petani, karena hanya membeli buah yang sudah disortir kualitasnya. Buruh

tani perempuan banyak terlibat dalam proses panen dan pasca panen kopi, mulai dari pemetaan, penyortiran, pemecahan biji, penjemuran, dan penumbukan. Sedangkan, buruh tani laki-laki lebih banyak terlibat dalam panen alpukat karena harus memanjat.

Di masa pasca panen, keluarga petani penggarap melakukan perhitungan keuntungan, pengelolaan bibit, inventaris ulang alat tani, dan memutuskan bersama jadwal panen. Pada saat pengelolaan bibit, buruh tani perempuan akan kembali dilibatkan untuk penyortiran maupun pengolahan hingga menjadi bibit siap pakai. Perempuan juga sering kali dipekerjakan di luar jam kerja pertanian sayur, seperti pada pengelolaan pasca panen kopi.

Ketimpangan Akses

Ketimpangan akses antara laki-laki dan perempuan adalah permasalahan mendasar yang terjadi dalam berbagai penerapan agroforestri. Degrande dan Arinloye (2014) mengatakan kondisi ketimpangan akses bermula dari ketajaman dikotomi produktif-reproduktif dalam rumah tangga. Dikotomi itu dilanggengkan oleh norma, budaya, dan religi yang menyebabkan perempuan dalam pertanian mengalami kondisi ketidakberdayaan secara struktural. Penelitian Catacutan dan Naz (2015), Degrande dan Arinloye (2014) dan Ihalainen dkk. (2020) menemukan bahwa perempuan kerap kesulitan mendapatkan akses ke alat produksi (penguasaan tenurial), teknologi untuk produktivitas pertanian, informasi, dan rantai produksi. Akses perempuan menuju penguasaan tenurial terbatas karena pewarisan patrilineal. Selain itu, perempuan tidak dilibatkan dalam penggunaan teknologi karena dianggap lebih cocok mengerjakan pekerjaan reproduktif rumah tangga. Perempuan menjadi terabaikan dalam perancangan sosialisasi dan pembahasan politik, sehingga akhirnya keterbatasan tersebut menghalangi langkah perempuan mengembangkan jejaringnya di pasar.

Ketimpangan akses perempuan juga ditemukan dalam pengelolaan agroforestri di hulu DAS Citarum. Corak patrilineal membatasi perempuan dalam pewarisan akses ke lahan

garapan. Selain itu, berbagai sosialisasi atas pengelolaan agroforestri maupun berbagai perkembangan teknologi yang mendorong produktivitas pertanian yang dilakukan pemerintah, institusi pendidikan, dan swasta terkesan eksklusif dan abai terhadap peran perempuan dan isu rumah tangga dengan hanya menysar kepala keluarga. Akhirnya, perempuan tidak benar-benar memahami manfaat prospek agroforestri dalam rumah tangga.

Praktik pengelolaan kopi menunjukkan adanya permasalahan ketimpangan akses. Berdasarkan wawancara dengan koordinator AGP bernama Syarif, sosialisasi pengelolaan kopi senantiasa menysar laki-laki karena diasumsikan sebagai kepala rumah tangga dan memiliki akses kontrol pengelolaan lahan lebih banyak daripada perempuan. Pada umumnya, sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan petani laki-laki sebagai kepala keluarga di kantor desa, pusat pembibitan, dan beberapa kali di kebun.

Sementara itu, di dalam wawancara terpisah dengan dua petani pengelola UMKM olahan kopi, Aan dan Yus menyebutkan, buruh tani perempuan lebih banyak andil peran dalam perawatan sampai pengelolaan pasca panen tanaman kopi. Pada tahap perawatan, buruh tani perempuan bertugas memotong ranting muda yang berpotensi menghalangi tumbuhnya *green bean*. Kegiatan ini lazim dilakukan bersamaan dengan *ngaramas*. Panen ditentukan oleh keterampilan pemetik atau pemanen kopi saat buah kopi menjadi kemerahan atau *coffee cherry*. Setelah panen, perempuan bertugas menyortir, membuka cangkang kopi dengan *huller*, dan menjemur hingga siap dipanggang. Namun di sisi lain, perempuan justru menjadi pihak yang paling tidak tahu ke mana perginya hasil panen tanaman kopi.

Pengelolaan tanaman kopi memerlukan perluasan akses dan kontrol untuk perempuan, khususnya dari kelompok buruh tani. Hal ini bertujuan agar buruh tani perempuan dapat lebih memahami manfaat dan andil peran dalam porsi lebih besar. Oleh sebab itu, secara

umum pengelolaan tanaman kopi dapat memberikan manfaat nilai sosial ekonomi yang lebih baik.

Perempuan Sebagai Tenaga Kerja Upah Murah

Secara struktural, keterlibatan perempuan dalam agroforestri berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Perempuan dalam rumah tangga petani dijadikan tenaga kerja murah atas alasan ekonomi dan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga Sachs (2019). Penelitian Puspitarini dan Familia (2018) yang berfokus pada rumah tangga buruh tani mengungkapkan bahwa buruh tani perempuan termarginalisasi atas mitos gender. Buruh tani perempuan terbiasa menjadi tenaga kerja pendukung dan belum memiliki kesadaran kelas. Mereka dipekerjakan karena dianggap buruh "ideal" yang terampil, rajin, teliti, patuh, dan murah. Akibatnya, petani perempuan tertekan secara vertikal dan horizontal.

Begitu pula pada perempuan di agroforestri hulu DAS Citarum yang diposisikan sebagai subordinat. Partisipasi petani penggarap perempuan dalam agroforestri dianggap sebagai tenaga kerja pembantu suami dan tidak digaji. Demikian pula dengan adanya selisih pengupahan antara buruh tani perempuan dan laki-laki. Berdasarkan berbagai wawancara, alasan kuat yang melatarbelakangi selisih upah adalah persepsi terhadap perempuan yang tidak melakukan pekerjaan fisik dengan intensitas tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengelola UMKM olahan kopi:

"Kegiatan panen sampai jemur dilakukan oleh perempuan karena lebih murah, apik, dan rapih kerjanya. Pengerjaannya juga tidak memerlukan alat berat, hanya kejelian mata saja, dan waktunya tidak harus semalaman ditunggu. Sementara *huller* dan *roasting* itu pakai alat, bahkan *roasting* itu bakarnya panas dan besar sekali, se-rumah, yang menjaganya laki-laki yang mana resikonya tinggi seperti itu." - (Wawancara dengan Asep, 21 Februari 2021)

Buruh tani perempuan akan lebih tertekan jika hal ini terus berlangsung. Di masa kini, agroforestri secara signifikan menciptakan selisih pendapatan dibandingkan pertanian sayur. Hal ini terutama pada kebun dengan vegetasi dominan tanaman kayu yang tidak memerlukan banyak tenaga perawatan karena durasi panen yang panjang. Buruh tani perempuan yang tidak memiliki tanah garapan dan kemampuan selain kemampuan dasar bertani (mencangkul, *ngaramas*) akan kehilangan nilainya sebagai tenaga kerja, sehingga rentan tersingkirkan dari sistem.

Faktor Hambatan dan Kesempatan

Penelusuran terhadap persinggungan antara faktor-faktor selain gender dibutuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan di atas. Penelitian Colfer dkk. (2015) mengidentifikasi beragam isu gender dalam penelitian agroforestri, yang kemudian disebutnya sebagai faktor, seperti demografi, budaya dan agama, hukum atau kebijakan formal, dan norma-norma yang berlaku. Penelitian Puspitarini dan Femilia (2018) yang menggunakan *Harvard Analytical Framework*, menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi hambatan dan kesempatan dalam analisis gender adalah norma sosial, hierarki, institusional, ekonomi, dan politik.

Persinggungan dengan agroforestri dapat menjadi dua mata pisau. Di satu sisi dapat menciptakan sistem yang berkeadilan gender, produksi, dan berkelanjutan. Namun juga sebaliknya, menumpulkan peran salah satu pihak. Menguraikan dan menggali faktor-faktor merupakan hal penting dalam penelitian gender dan agroforestri untuk mengetahui hambatan dan kesempatan.

Faktor	Hambatan	Kesempatan
Budaya dan Agama	Patriarki menjadikan perempuan ter subordinasi dalam akses dan kontrol ke sumber daya dan manfaat.	Memberikan laki-laki sebagai kepala keluarga lebih banyak kesempatan akses dan kontrol ke sumber daya dan manfaat.

Demografi	Tingginya populasi perempuan tidak disertai tingkat pendidikan dan lapangan kerja baru. Sehingga pekerjaan terbatas pada buruh tani.	Mengorganisir dan konsolidasi tenaga kerja untuk mengembangkan agroforestri.
Ekonomi	Perempuan menjadi tenaga kerja upah murah.	Laki-laki banyak andil peran sebagai bandar yang bertugas dalam mencari jalur ke pasar sayur dan kopi.
Hukum Formal dan Peraturan Lainnya	Peraturan belum mencakup isu gender menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam penyuluhan.	Peraturan yang ada mendorong petani sayur berubah ke agroforestri.
Kelas Sosial	Memunculkan ketimpangan ganda, antara pemerintah dengan petani, sesama petani, bahkan sesama petani perempuan.	Pengelompokan memudahkan peluang pemberdayaan terhadap tiap-tiap kelas.
Politik	Dipersepsikan terlalu maskulin dan penuh tipu daya, seiring banyaknya konflik pengelolaan lahan tanah di DAS Citarum.	Jejaring kekuasaan aktor memudahkan birokrasi pengajuan bantuan alat produksi dan kegiatan penyuluhan.

Tabel 3. Hambatan dan Kesempatan Pengelolaan Agroforestri

Sumber: Data Lapangan

Tabel 3 menunjukkan bahwa tiap faktor sosial berpeluang menjadi hambatan atau kesempatan. Hal ini seperti yang dikatakan Colfer dkk. (2015) bahwa faktor-faktor tidak berdiri sendiri dan menekan khusus pada individu. Namun, setiap faktor bekerja secara kompleks dan memberikan penekanan secara sosial. Oleh karena itu, proses identifikasi dan penguraian penting dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan agroforestri.

Simpulan

Berdasarkan kacamata ekologi, agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang bersifat dualisme. Di satu sisi bertujuan menjaga harmonisasi antara manusia dan lingkungan, tetapi di sisi lain juga tidak terhindar dari tarik menarik kepentingan antara ekonomi dan ekologi. Hal ini bergantung pada dinamika ekologi politik di dalamnya. Begitu pula agroforestri di hulu DAS Citarum, sistem yang dicita-citakan menjadi komprehensif ini justru berhadapan dengan isu resistensi petani karena berbenturan dengan isu ekonomi. Pendekatan sosial terhadap petani diperlukan guna membedah permasalahan. Analisis pembagian

kerja berdasarkan gender pada rumah tangga petani memudahkan analisis mekanisme kerja, akses, peluang, dan faktor sosial-budaya yang mempengaruhi sistem.

Studi ini menemukan pembagian kerja berdasarkan gender berfungsi mendistribusikan pekerjaan yang dipersepsikan khusus untuk laki-laki atau perempuan dalam pengelolaan agroforestri. Distribusi kerja pada umumnya bercorak patriarki, tetapi seiring waktu mekanismenya semakin cair dan dapat dipertukarkan dalam kondisi tertentu, khususnya karena himpitan ekonomi.

Perempuan dan laki-laki bekerja sama untuk beradaptasi dari sistem pertanian sayur ke agroforestri. Sayangnya agroforestri tidak diintroduksi baik. Sosialisasi yang eksklusif dan abai terhadap aspek gender mengakibatkan perempuan teralienasi sistem. Partisipasi perempuan dibatasi oleh faktor-faktor budaya dan agama, demografi, ekonomi, hukum formal, kelas sosial, dan politik. Perempuan tidak berdaya secara horizontal (antar kelas petani dan buruh tani) dan vertikal (sesama kelas), sehingga hanya menjadi *puppets* dalam sistem.

Pada akhirnya, agroforestri tidak dapat mendulang hasil apabila belum “berdamai” dengan pendekatan gender. Analisis terhadap keterkaitan faktor-faktor sosial budaya, dukungan internal dan eksternal (kebijakan, pemerintah, donor, swasta) dibutuhkan untuk memperbaiki dan membuka akses perempuan ke sumber daya dan manfaat, khususnya teknologi, informasi, dan pasar. Apabila hal ini tercapai, perempuan dapat terjamin dan berdaya, serta agroforestri secara signifikan bermanfaat bagi ekonomi petani.

Ucapan Terima Kasih

Sub bab introduksi agroforestri dalam studi ini merupakan bagian dari hibah Riset Internal Unpad skema *Academic Leadership Grant* (ALG) berjudul, “*Sustainability Science in The Context of Rural Urban Linkage: Case Study on The Impact of Ecological Change in The Upper Citarum Watershed To The Food Security And Food Sovereignty In West Java, Indonesia*”.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, O. S., Sunardi, S., Widianingsih, I., dan Cahyandito, M. F. (2019). Pemetaan Sosial Dalam Perencanaan Program Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Citarum Hulu. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 59.
- Asian Development Bank. (n.d). *Indonesia: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program - Project 1*. Diambil dari <https://www.adb.org/projects/37049-023/main#project-overview>
- Ayantunde, A. A., Briejer, M., Hiernaux, P., Udo, H. M. J., dan Tabo, R. (2008). Botanical Knowledge and its Differentiation by Age, Gender and Ethnicity in Southwestern Niger. *Human Ecology*, 36(6), 881–889.
- Bourne, M., Kimaiyo, J., Tanui, J., Catacutan, D., dan Otiende, V. (2015). Can Gender Appreciation of Trees Enhance Landscape Multifunctionality? A case of Smallholder Farming Systems on Mount Elgon. *International Forestry Review*, 17(4), 33–45.
- Butarbutar, T. (2009). Inovasi Manajemen Kehutanan Untuk Solusi Perubahan Iklim Di Indonesia. *Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6 No. 2, 121–129.
- Catacutan, D., dan Naz, F. (2015). Gender Roles, Decision-Making and Challenges to Agroforestry Adoption in Northwest Vietnam. *International Forestry Review*, 17(4), 22–32.
- Cita Citarum. (2012). Keberhasilan Program Penghijauan Masih Rendah. Diambil dari <http://citarum.org/info-citarum/arsip-berita/media-online/1037-keberhasilan-program-penghijauan-masih-rendah.html>
- Colfer, C. J. P., Catacutan, D., dan Naz, F. (2015). Introduction: Contributions and Gaps in Gender and Agroforestry. *International Forestry Review*, 17(4), 1–10.
- Degrande, A., dan Arinloye, D.-D. A. (2014). Gender in Agroforestry: Implications for Action-Research. Dalam *Nature and Faune: Enhancing Natural Source Management for Food Security in Africa* (pp. 6–12). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Elias, M., Basnett, B. S., dan de Pryck, J. D. (2020). Tackling Gender Inequality Through Forest-Related Policies and Programmes. *The Wicked Problem of Forest Policy*, 167–196.
- Heryani, N., dan Sutrisno, N. (2013). Teknologi Konservasi Tanah dan Air untuk Mencegah

- Degradasi Lahan Pertanian Berlereng. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 32(3).
- Humas Bappeda Jabar. (2019). Satgas Lakukan Evaluasi Citarum Harum. Diambil dari <http://bappeda.jabarprov.go.id/satgas-lakukan-evaluasi-citarum-harum/>
- Ihalainen, M., Schure, J., dan Sola, P. (2020). Where are the women? A Review and Conceptual Framework for addressing gender equity in charcoal value chains in Sub-Saharan Africa. *Energy for Sustainable Development*, 55, 1–12.
- Imansyah, M. F. (2012). Studi Umum Permasalahan Dan Solusi Das Citarum Serta Analisis Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Sositoteknologi*, 11(25), 18–33.
- Jerneck, A., dan Olsson, L. (2013). More than Trees! Understanding the Agroforestry Adoption Gap in Subsistence Agriculture: Insights from Narrative Walks in Kenya. *Journal of Rural Studies*, 32, 114–125.
- Kiptot, E., dan Franzel, S. (2011). Gender and agroforestry in Africa: Are Women Participating. *ICRAF Occasional Paper*.
- Kiptot, E., dan Franzel, S. (2012). Gender and Agroforestry in Africa: A Review of Women's Participation. *Agroforestry Systems*, 84(1), 35–58.
- Kottak, C. P. (2017). *Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity* (Seventeenth). McGraw-Hill Education.
- Martin, E., Darusman, D., Suharjito, D., Sunito, S., dan Winarno, B. (2016). Etika Subsistensi Petani Kopi: Memahami Dinamika Pengembangan Agroforestri di Dataran Tinggi Sumatera Selatan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 92–102.
- Mayrowani, H., dan Ashari, N. (2016). Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 83.
- Mulyoutami, E., Roshetko, J. M., Martini, E., Awalina, D., dan Janudianto. (2015). Gender Roles and Knowledge in Plant Species Selection and Domestication: A Case Study in South and Southeast Sulawesi. *International Forestry Review*, 17, 99–111.
- Nguyen, M. P., Pagella, T., Catacutan, D. C., Nguyen, T. Q., dan Sinclair, F. (2021). Adoption of Agroforestry in Northwest Viet Nam: What Roles Do Social and Cultural Norms Play? *Forests*, 12(4).
- Noordwijk, M. van, Agus, F., Suprayogo, D., Hai-riah, K., Pasya, G., Verbist, B., dan Farida. (2005). Peranan Agroforestri dalam Mempertahankan Fungsi Hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS). *Proceedings of a Workshop in Padang/Singkarak, West Sumatra, Indonesia*.
- Ollinaho, O. I., dan Kröger, M. (2021). Agroforestry transitions: The good, the bad and the ugly. *Journal of Rural Studies*, 82, 210–221.
- Ora, Y. A. N. R., dan Adrin, A. (2010). The Potential for Carbon Sequestration in Agroforestry Systems. *Partner*, 17(1), 67–77.
- Pasaribu, S. W., Kaskoyo, H., dan Safe'i, R. (2019). The Gender Role in Agroforestry Management in Sungai Langka Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, Lampung Province. *Journal of Sylva Indonesiana*, 2(2), 62–69.
- Puspitarini, D., dan Femilia, P. S. (2018). Relasi Gender dan Kehidupan Sosial Ekonomi dalam Keluarga Buruh Tani Perempuan di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Journal An-Nisa'*, 11(2), 117–144.
- Rahman, S. A., Jacobsen, J. B., Healey, J. R., Roshetko, J. M., dan Sunderland, T. (2017). Finding Alternatives to Swidden Agriculture: Does Agroforestry Improve Livelihood Options and Reduce Pressure on Existing Forest? *Agroforestry Systems*, 91(1), 185–199. <https://doi.org/10.1007/s10457-016-9912-4>
- Rahmawati, F., dan Abdulkadir-Sunito, M. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses dan Kontrol Laki-Laki dan Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Rakyat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 206–221.
- Ross, M. S. (1984). Towards a Farm Model for Sustainable, Low-Input Agroforestry Systems in The Humid Tropics with Reference to Indonesia. *International Tree Crops Journal*, 3(1), 49–61.
- Sachs, C. (2019). *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment*. Routledge.
- Safitri, H., Saeful, Z., Prawiranegara, I., dan Bachriadi, D. (2020). *Land Contestation and Military intervention in Indonesia's Citarum River Ecological Project* (01/WP-CTR/2020; Working Paper ARC, Issue March). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33248.02563>
- Siscawati, M. (2020). *Gender and forest tenure reform in Indonesia* (Vol. 258). Bogor: CIFOR.
- Supriadi, H., dan Pranowo, D. (2016). Prospek

- Pengembangan Agroforestri Berbasis Kopi di Indonesia. *Perspektif*, 14(2), 135.
- Syam, A. (2003). Sistem pengelolaan lahan kering di daerah aliran sungai bagian hulu. *Jurnal Litbang Pertanian*, 22(4), 162–171.
- Villamor, G. B., Akiefnawati, R., Van Noordwijk, M., Desrianti, F., dan Pradhan, U. (2015). Land use change and shifts in gender roles in central Sumatra, Indonesia. *International Forestry Review*, 17(4), 61–75.
- Wahanisa, R. (2015). Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). *Yustisia*, 4(2), 416–438.
- Wawa, J. E. (Ed.). (2011). *Ekspedisi Citarum: Laporan Jurnalistik Kompas*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Wiyanti, D. T. (2014). Women Produce Less Carbon?: A Study of Women in Cianjur Agroforestry, West Java. *Asean Journal of Economics, Management and Accounting*, 2(Dec), 1–10.